

**ORIENTASI NILAI BUDAYA PADA KONDISI *INEQUALITY* :  
Studi pada Komunitas yang Berpotensi Konflik  
Seputar Taman Nasional Teso Nilo (TNTN)**

Oleh : Hesti Asriwandari

Abstract

*This paper seeks to study the anomic behavior that emerges from and the value orientation that precedes the latent intercommunity conflict in the regions affected by the expansion of the Teso Nilo National Park in Pelalawan regency, Riau province. In accordance with Johan Galtung's theory of conflict and violence, this paper will expose the cultural and structural violence that creates an invisible conflict in the society. A structural analysis will explain the existence of pressures on any attempt to achieve welfare and the difference in subsistence ability. On the other hand, a cultural analysis will discuss the value orientation differences between communities that disrupt social relation and integration. Adaptive behavior that emerges from any social inequality is preceded by a value orientation system and communal attitude.*

*Keywords: value orientation, social anomie, conflict, Petalangan, Kesuma Village*

**I. PENDAHULUAN**

Dinamika masyarakat dan kebudayaan menghantarkan manusia kepada fenomena sosial yang khas, yaitu konflik, perubahan sosial, dan pola perilaku yang terbentuk oleh karenanya. Keterbatasan sumber daya alam, yang mana pada permasalahan disini ialah keterbatasan hutan sebagai sumber kehidupan, telah mengakibatkan konflik sosial yang berkelanjutan. Masyarakat yang semula bersahabat dengan alam, dengan perlahan berubah menjadi musuh alam yang utama. Struktur

sosial yang pada mulanya mengatur kehidupan yang selaras antara manusia dengan persekitarannya, lambat-laun memudar dan berganti dengan nilai-nilai ekonomis yang akhirnya melahirkan persaingan dan konflik berkepanjangan, dan kerap kali berhimpitan dengan perbedaan-perbedaan budaya.

Pembedaan secara struktur (*structural differentiation*) muncul sebagai akibat dari tidak meratanya akses ekonomi dan politik, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial. Ketidaksamaan kesempatan

(*inequality*) merupakan keadaan masyarakat yang berpotensi besar untuk menciptakan konflik. Industrialisasi berakibat pada meluasnya kepentingan ekonomi pada berbagai dimensi kehidupan. Demikian pula halnya pada masyarakat Petalangan yang pada mulanya memaknai hutan sebagai orientasi nilai budaya mereka, kemudian secara perlahan berubah menjadi sekedar bernilai ekonomi. Hal ini berdampak luas, baik pada kerusakan hutan itu sendiri, maupun munculnya konflik antar komunitas yang dipicu oleh adanya kesenjangan ekonomi.

Terjadinya konflik banyak dipicu adanya perbedaan sudut pandang dan kepentingan. Pada umumnya konflik dapat terjadi karena mempertahankan ideologi juga adanya kecenderungan yang berorientasi terhadap nilai-nilai ekonomi. Manusia setiap harinya tidak luput dari aktivitas memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dengan menjalani berbagai usaha. Tidak jarang masyarakat tersebut bersentuhan dengan hukum dalam memenuhi kebutuhan karena telah melanggar hal yang bersifat normatif yang dibuat oleh pembuat kebijakan, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga formal lainnya.

Salah satu perselisihan yang cukup kuat berpengaruh pada pihak-pihak yang terlibat ialah sebuah kasus perluasan hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, yang

melibatkan pemerintah dengan masyarakat tempatan. Tercatat pada laporan Badan Kesbangpol Linmas Provinsi, bahwa pada hari Selasa, 13 September 2011, pukul 11.30 wib, di Kantor Bupati Pelalawan, terjadi unjuk-rasa antara Forum Kerukunan Petani Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang menggerakkan massa sebanyak ± 2300 orang.

Tepatnya tanggal 19 Juli 2006 Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri yang menetapkan Provinsi Riau sebagai pusat konservasi gajah Sumatera melalui Permenhut No. P.54. Melalui Peraturan Menteri ini diharapkan dapat menjawab persoalan konflik manusia-gajah di Riau. Namun kenyataannya, Taman Nasional Tesso Nilo yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi penanganan konflik manusia-gajah hingga kini belum terbebas dari berbagai permasalahan yang mengancam keutuhan kawasan, khususnya sebagai habitat gajah. Penebangan liar, perambahan, dan pembakaran lahan tetap terjadi di kawasan ini. Hutan Tesso Nilo adalah salah satu blok hutan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera.

Kawasan ini terletak di Provinsi Riau yang merupakan salah satu dari 200 Ecoregion WWF Global. WWF berjuang untuk melestarikan Hutan Tesso Nilo dan menjadikannya sebagai contoh bentang alam hutan dataran

rendah Sumatera yang luas. Hutan Tesso Nilo terbentang di empat kabupaten yaitu Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Kampar. Seluas 38. 576 Ha hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu ditunjuk menjadi Taman Nasional Tesso Nilo pada 19 Juli 2004. Pada 19 Oktober 2009, taman nasional tersebut diperluas menjadi + 83.068 Ha. Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan perwujudan komitmen bersama antara Departemen Kehutanan, pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan, yang didukung oleh Forum Masyarakat Tesso Nilo, Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo dan LSM. Kesepakatan ini tercantum dalam “Kesepakatan Bersama mengenai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo dan Penanganan *Illegal Logging*, Perambahan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di kawasan Tesso Nilo”, yang disahkan pada akhir Agustus 2008 di Pekanbaru.

Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo yang diusulkan awalnya mencakup kawasan eks HPH PT. Nanjak Makmur seluas ± 44.492 dan PT. Siak Raya Timber seluas ± 18.812 ha, namun hingga akhir proses perluasan, eks HPH Nanjak Makmur saja yang telah siap untuk perluasan taman nasional tersebut. Awalnya perluasan TNTN direncanakan menjadi ± 100.000 ha namun sejauh

ini baru HPH PT. Nanjak Makmur yang telah siap mendukung perluasan TNTN oleh karena itu perluasan baru dilaksanakan di kawasan tersebut. Meskipun demikian kawasan usulan perluasan TNTN yang berada pada konsesi PT. Siak Raya Timber dapat dijadikan daerah penyangga TNTN dan pemegang konsesi tersebut berperan dalam mengamankan kawasan hutan Tesso Nilo agar kawasan itu dapat mengakomodasi kebutuhan habitat gajah. Perluasan TNTN juga merupakan langkah konkrit Kementerian Kehutanan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.54/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Riau sebagai pusat konservasi gajah Sumatera.

Unjuk-rasa yang dilakukan pada bulan September tahun 2011 itu, ialah karena warga menolak perluasan kawasan TNTN, dan hendak membatalkan kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh Bupati pada bulan sebelumnya. Perluasan lahan hutan lindung tersebut akan mengurangi lahan garapan masyarakat, dan hak masyarakat atas tanah yang dilindungi oleh adat tempatan. Fenomena ini mewakili sebuah kesenjangan sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat tempatan, dan menyiratkan sebuah fenomena ketidaksamaan (*inequality*) antara komunitas di dalamnya.

Permasalahan yang berlarut-larut di desa seputar Taman Nasional Tesso Nilo belum dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun sudah dibentuk tim penyelesaian antara Pemerintah Daerah dengan Forum Kerukunan Petani yang mengatasmamakan masyarakat, akan tetapi persoalan belum dapat diatasi dengan tuntas. Kondisi demikian tidak memberikan tindakan hukum bagi para perambah hutan. Meluasnya pembalakan liar yang dilakukan ditandai oleh aktifitas beberapa unit penggergajian kayu (*Saw Mill*) ilegal dan tidak ada kerjasama yang baik dengan para pemangku adat sebagai penguasa hutan yang menguasai hak wilayah.

Berdasarkan asumsi bahwa keadaan *inequality* menjadi latar belakang terjadinya konflik di dalam dan antara komunitas, dan bahwa setiap masyarakat dipelihara oleh sistem nilai dan pola tingkah laku tertentu, maka diajukan beberapa permasalahan kajian pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana identifikasi konflik yang terjadi pada komunitas yang diamati?
2. Bagaimana deskripsi kelompok komunitas yang diamati berdasar pada bentuk *inequality* di dalamnya?
3. Bagaimana perbedaan orientasi nilai yang mendasari perilaku konflik di dalam dan antara komunitas?

Kajian ini hendak menjawab beberapa permasalahan yang telah disebutkan, dan bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan konflik yang terjadi pada komunitas yang diamati
2. Mendeskripsikan dan menganalisis identitas kelompok komunitas yang diamati berdasarkan bentuk *inequality* di dalamnya.
3. Menganalisis perbedaan orientasi nilai yang mendasari perilaku konflik di dalam dan antara komunitas?

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang termasuk ke dalam pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini menekankan aspek subyektif dari perilaku orang, berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mengerti mengenai nilai-nilai yang dikembangkan di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari subyek. Fenomenologi membiarkan informan memberikan keterangan atau gambaran serta persepsinya sendiri tentang keadaan yang sedang mereka alami, tanpa dipengaruhi oleh siapapun di luar dirinya. Pendekatan semacam ini, diharapkan hasil penelitian akan mampu memberikan gambaran yang lebih mendekati kenyataan.

Kawasan penelitian ialah Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan

Kuras, Kabupaten Pelalawan, yang memiliki potensi besar berada pada kondisi konflik dan *inequality*. Hal ini disebabkan munculnya gejala konflik pemilikan hutan tanah antara warga desa dengan pihak pengelola Taman Nasional maupun Pemerintah serta Industri di wilayah tersebut. Desa ini berada pada jarak 58 km dari ibukota Kabupaten Pelalawan, dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, tepatnya di Dusun III Bukit Kesuma, yang memiliki potensi konflik dengan munculnya berbagai perilaku adaptasi terhadap keadaan anomi sosial.

Karena penelitian ini merupakan studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif, maka pengambilan informan dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh gambaran seluas-luasnya tentang orientasi nilai masyarakat seputar Taman Nasional Tesso Nilo. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat baik dari kelompok *formal-leader* maupun *informal-leader* yang berada pada komunitas yang diamati dan memahami nilai-nilai serta pola perilaku pada komunitas tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi akurat mengenai orientasi nilai masyarakat desa Kesuma.

Wawancara dilakukan secara berstruktur, dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kajian awal terhadap kondisi lapangan.

2. Pengamatan lapangan. Pengamatan lapangan dilakukan untuk lebih memahami seluk beluk kehidupan masyarakat sebagai unit analisa. Pengamatan lapangan juga dimaksudkan untuk memeriksa ulang data maupun informasi yang diperoleh dari wawancara dengan kenyataan di lapangan
3. Studi kepustakaan dokumen formal dilakukan untuk lebih memahami nilai-nilai budaya masyarakat Pelalawan yang bersumber dari catatan-catatan tentang masyarakat adat Petalangan.

Data yang terkumpul disusun menurut komponen permasalahan yang hendak dijelaskan dan dianalisis. Jawaban-jawaban subyek diklasifikasikan, diinterpretasikan, dan diberikan makna serta dilakukan analisis untuk mengaitkan dengan fenomena yang hendak dijelaskan. Pemahaman fenomena diperkuat dengan mengaplikasikan konsep serta teori yang sesuai, sehingga diperoleh sebuah penjelasan yang menyeluruh mengenai fenomena sosial yang menjadi tujuan penelitian.

## II. IDENTIFIKASI KONFLIK

Desa Kesuma merupakan daerah dataran rendah sungai Nilo dan anak-anak sungainya yang mengalir membentang sepanjang wilayah desa dengan suhu udara yang dipengaruhi oleh suhu permukaan laut. Pada awalnya desa Kesuma merupakan gabungan dari kampung-kampung kecil yang berdiam di sepanjang sungai Nilo dan anak sungainya. Kampung-kampung tersebut dihuni oleh beberapa keluarga yang bermata pencaharian sebagai nelayan, berburu, dan memanfaatkan hasil alam yang berupa rotan, gaharu, jelutung, minyak kayu. Selain itu mereka juga membuka lahan pertanian untuk bertanam padi dan sayuran untuk memenuhi kebutuhannya. Sungai-sungai tersebut memiliki banyak anak sungai dan perkampungan yang berada di hulu sungainya. Kehidupan masyarakat sebelum Indonesia merdeka lebih dikenal sebagai masyarakat lahan berpindah. Kebanyakan mereka hidup ditepi sungai karena sungai merupakan akses transportasi dari kampung satu ke kampung lainnya.

Setelah kemerdekaan terjadilah pemusatan penduduk pada titik konsentrasi tertentu seperti Kampung Kuala Napuh, Kampung Pangkalan Pasir (Dusun I) dan Kampung Sungai Medang (Dusun II) desa kesuma sekarang ini. Jumlah kepala keluarga yang berada di desa Kesuma pada Dusun I sebanyak 139 kepala

keluarga, Dusun II sebanyak 881 kepala keluarga dan Dusun III sebanyak 1.726 kepala keluarga. Pada awalnya desa Kesuma memiliki 2 dusun (Dusun I Kesuma dan Dusun II Sungai Medang) sedangkan Dusun III Bukit Kesuma merupakan dusun baru dimekarkan. Arus migrasi terjadi sangat pesatnya di Dusun III Bukit Kesuma ini, begitu juga Dusun II Sungai Medang yang pada awal jumlah penduduknya hanya sebanyak 19 kepala keluarga. Luas desa Kesuma ± 51.350 ha yang terdiri dari lahan olahan masyarakat, lahan penyangga sungai, lahan konservasi Taman Nasional, dan lahan yang berada dalam wilayah Perusahaan.

Persaingan ekonomi di desa ini cukup tinggi karena seluruh kegiatan ekonomi dikuasai oleh masyarakat pendatang. Persaingan tersebut terlihat pada aktifitas pasar, dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha produktif yang lebih dikuasai oleh pendatang. Pesatnya masyarakat pendatang ke desa ini secara positif memberikan warna tersendiri terhadap desa ini. Namun disamping itu sangat berpengaruh terhadap peradaban masyarakat lokal yang tidak memiliki modal dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dalam usaha-usaha di bidang ekonomi.

Para pendatang yang memiliki keterampilan dan penguasaan strategi ekonomi yang lebih maju dibandingkan

dengan penduduk asli, memberikan pengaruh yang besar terhadap persaingan hidup. Penduduk pendatang sudah memiliki kesiapan untuk bersaing dalam kehidupan, karena mereka memulai hidup di kawasan baru dan memulainya dari awal. Pengamatan di lapangan memberi informasi bahwa selama ini orang asli kebanyakan hanya menjual lahan, dan kehidupannya jauh tertinggal dibandingkan para pendatang. Ketimpangan dan *inequality* terjadi antara keempat komunitas tersebut dengan kesempatan dan *institutional means* yang berbeda serta usaha pencapaian yang juga berbeda. Kondisi *inequality* ini terlihat dari berbagai parameter, yaitu tingkat pendapatan, tingkat kesejahteraan, penguasaan sumber ekonomi, kondisi rumah, dan sebagainya.

Berbagai sikap *stereotype* terbentuk oleh kondisi ketimpangan ekonomi ini. Khususnya ketika terjadi segregasi tempat tinggal (*spacial segregation*), yaitu para pendatang bermukim pada suatu kawasan yang diberi nama Bukit Horas pada jalan koridor wilayah perkebunan sawit sebuah perusahaan besar PT RAPP. Kesenjangan ekonomi berjalan seiring dengan perbedaan etnis, budaya, agama, dan keadaan ini melatarbelakangi sikap antar

komunitas dan perilaku yang mengikutinya, dan menciptakan keadaan anomie sosial.

Kekerasan struktur dan budaya sebagaimana disampaikan Galtung, ialah kekerasan yang tidak tampak sebagai potensi konflik sosial antar komunitas, dan menghasilkan sebuah situasi kontradiksi (konflik) dalam masyarakat. Sedangkan kekerasan langsung adalah bentuk kekerasan fisik yang tampak dan terjadi antar individu maupun antar kumpulan atau komunitas.<sup>1</sup> Sumber konflik yang dapat dikenali ialah terjadinya tekanan terhadap empat kebutuhan dasar manusia, yaitu keberlangsungan hidup (*survival needs*), kesejahteraan (*well-being needs*), kebebasan (*freedom needs*), dan identitas (*identity needs*). Setiap tekanan atau kekerasan terhadap kebutuhan dasar tersebut akan menghasilkan bentuk kekerasan tertentu.<sup>2</sup> Bentuk konflik yang ditemui pada komunitas desa Kesuma adalah konflik yang tidak tampak, diakibatkan oleh kekerasan struktur dan budaya antar komunitas yang ada, dan yang bersumber pada tekanan dan pembatasan terhadap kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan (*well-being needs*).

<sup>1</sup> Galtung, 1973, *Journal of Peace Research*, hal 9.

<sup>2</sup> Galtung, 1973, *Journal of Peace Research*, hal 21.

### III. PENDEKATAN KONFLIK DAN ORIENTASI NILAI

Konsep stratifikasi sosial menjelaskan bahwa berbagai ketidaksamaan kesempatan (*'inequality'*) dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik. Perspektif konflik juga menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan kepentingan antara kumpulan dan komunitas sangat potensial untuk menciptakan konflik sosial dan politik. Selain dari pada itu, sebagaimana dipahami oleh para pengamat fenomena konflik sosial, perbedaan nilai antara komunitas sering menjadi sumber konflik dengan intensitas yang tinggi. Masyarakat dengan kesenjangan tingkat kesejahteraan, atau yang mengalami perbenturan nilai dan kepentingan, akan menyimpan potensi konflik yang besar. Maka dengan demikian, menurut perspektif konflik, intensitas konflik bukan sahaja disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kultur atau budaya, akan tetapi lebih diakibatkan oleh masalah-masalah yang bersifat struktur.

Galtung berpendapat bahwa tiga komponen harus muncul dalam sebuah konflik total. Struktur konflik tanpa sikap atau perilaku konflikual merupakan sebuah konflik laten. Galtung melihat konflik sebagai proses dinamis, dimana struktur, sikap, dan perilaku secara konstan berubah dan

saling mempengaruhi. Ketika konflik muncul, kepentingan pihak-pihak yang bertikai masuk ke dalam konflik atau hubungan dimana mereka berada. Kemudian pihak-pihak yang bertikai mengorganisasi diri di sekitar struktur ini untuk mengejar kepentingan mereka. Mereka mengembangkan sikap yang membahayakan dan perilaku konflikual, sehingga formasi konflik mulai tumbuh dan berkembang. Konflik dapat melebar, menimbulkan konflik sekunder pada pihak-pihak utama, atau pihak-pihak yang terseret masuk.<sup>3</sup>

Kondisi yang meliputi hubungan antar komunitas dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat budaya. Sikap yang berkembang dalam komunitas berkaitan dengan persekitaran alam dan sosial dilatarbelakangi oleh sistem nilai tertentu. Nilai, dalam pengertiannya sebagai standard, adalah konsepsi tentang *the desirable*. Nilai merupakan kriteria dalam menentukan tentang apa yang seharusnya diinginkan seseorang sebagai anggota suatu masyarakat. Sedangkan orientasi nilai adalah suatu konsepsi yang umum dan terorganisasi tentang alam, tentang tempat manusia dalam alam, tentang hubungan manusia dengan manusia, dan tentang *the desirable* dan *nondesirable*. Di sini konsepsi tersebut ditempatkan dalam konteks hubungan

---

<sup>3</sup> Liliwari, 2009, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik, Suatu Pengantar*, hal 35.

manusia dengan persekitarannya dan hubungan antar manusia. Orientasi-nilai, sebagai sebuah konsepsi, mempengaruhi perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam dan dengan manusia yang lain (Marzali: 1998).

Tabel di bawah menunjukkan ragam orientasi nilai yang dikembangkan oleh Florence Kluckhohn, yang mungkin akan berkembang dan menguasai suatu komunitas atau masyarakat tertentu:

Masalah Dasar Hidup	Kemungkinan Variasi Orientasi Nilai Budaya		
	KONSERVATIF	TRANSISI	PROGRESIF
Human Nature (Hidup)	Hidup tidak dapat berubah	Hidup itu baik, bisa menjadi lebih baik	Hidup akan berubah menjadi baik
Humanity and natural environment (Alam)	Tunduk pada alam	Selaras dengan alam	Menguasai alam
Time (Waktu)	Orientasi masa lalu	Orientasi masa sekarang	Orientasi masa depan
Motive of behaving (Sosialitas)	Orientasi pemenuhan kebutuhan hidup	Orientasi status dan kehormatan	Orientasi pencapaian prestasi
Relating to other people (Hubungan manusia)	Orientasi lateral (horizontal)	Orientasi vertikal	Individualisme

Menurut Kluckhohn dan Strodtbeck, konsepsi mengenai isi dari nilai budaya yang secara universal ada dalam tiap kebudayaan menyangkut paling sedikit lima hal, yaitu 1) masalah *human nature*, atau makna hidup manusia; 2) masalah *man nature*, atau makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya; 3) masalah *time*, atau persepsi manusia mengenai waktu; 4) masalah *activity*, atau soal makna dari pekerjaan, karya dan amal perbuatan manusia, dan 5) masalah *relational*, atau hubungan manusia dengan sesama manusia. Kelima masalah tersebut sering disebut sebagai orientasi nilai budaya (*value orientation*). Cara berbagai kebudayaan mengkonsepsi-

kan orientasi nilai budaya universal dapat berbeda-beda.<sup>4</sup>

#### IV. DESKRIPSI KOMUNITAS DAN PERBEDAAN ORIENTASI NILAI

Tekanan untuk mencapai kesejahteraan berlaku pada seluruh warga komunitas, namun demikian sarana untuk mendapatkannya tidak tersedia secara merata. Setiap komunitas dengan karakteristik dan latar belakang sosial budaya masing-masing, memiliki sikap, kemampuan serta kehendak yang berbeda dalam berupaya mencapai kesejahteraan dan dalam menguasai sarana pencapaiannya. Berikut adalah ragam perilaku yang muncul pada situasi anomie :

Komunitas I dengan perilaku <i>conformity</i>	Komunitas ini mampu mencapai kesejahteraan sebagai standar pencapaian budaya. Diantaranya ialah para <i>informal leader</i> , yakni para batin ataupun ninik mamak, serta warga desa biasa. Selain pemilik tanah mereka juga memiliki pekerjaan yang memberi kepuasan tentang tingkat kesejahteraan.
Komunitas II dengan perilaku <i>ritualis</i>	Komunitas ini ialah orang-orang asli yang tidak pernah mencapai tingkat kesejahteraan yang layak karena mereka ialah kumpulan yang tidak memiliki lahan hutan, dan tetap menjalankan cara-cara untuk mencapai kesejahteraan sebagai nelayan sungai.
Komunitas III dengan perilaku <i>innovative</i>	Komunitas ini ialah kumpulan pendatang, dari luar daerah dan dari etnis yang berbeda. Kumpulan yang siap beradaptasi dengan keadaan alam dan sosial yang mereka datangi. Sikap kumpulan pendatang adalah sikap menerima tujuan budaya dari masyarakat tempat mereka tinggal, agar mereka diterima di tempat yang baru.
Komunitas IV dengan perilaku <i>rebellion</i>	Komunitas yang merupakan bagian dari masyarakat adat, yang menciptakan sendiri standar kesejahteraan yang harus dicapai. Hal ini dapat mereka lakukan karena otoritas yang mereka miliki, yaitu sebagai aparat pemerintah desa, dan sebagai ninik mamak atau pemangku adat lainnya ( <i>formal dan informal leader</i> ).

Setiap komunitas mengembangkan perilaku tertentu sebagai adaptasi terhadap kondisi anomie yang mereka hadapi. Tujuan budaya (*cultural goal*) menekankan

<sup>4</sup> Koentjaraningrat, 1990, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, hal 45.

pencapaian (*achievement*) pada bidang tertentu, seperti pekerjaan, pendapatan dan pendidikan, dan lazim menciptakan tekanan psikologis yang kuat pada individu-individu untuk bersaing mendapatkan dan menggunakan cara-cara yang memungkinkan mereka untuk mewujudkannya (Merton: 1981).<sup>5</sup> Pada komunitas desa Kesuma yang mengalami konflik tersembunyi, didapati berbagai perbedaan sikap yang kemudian menghasilkan perbedaan perilaku. Analisa mengenai orientasi nilai yang berkembang pada komunitas-komunitas yang ada dilakukan dengan merujuk pada klasifikasi orientasi nilai budaya yang disusun oleh Kluckhohn, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Kumpulan komunitas	Orientasi nilai	Sikap
Komunitas I dengan perilaku <i>conformity</i>	<i>Human Nature</i> (Hidup)	Hidup itu baik, bisa menjadi lebih baik jika berusaha (T)
	<i>Humanity and natural environment</i> (Alam)	Selaras dengan alam (T)
	<i>Time</i> (Waktu)	Orientasi masa depan (P)
	<i>Motive of behaving</i> (Kegiatan)	Orientasi status dan kehormatan (T)
	<i>Relating to other people</i> (Hubungan manusia)	Orientasi vertikal (T)
Komunitas ini mampu mencapai kesejahteraan sebagai standar pencapaian budaya. Diartikan oleh para <i>informal leader</i> , yakni para butin ataupun rimik masak, serta warga desa bera. Selain pemilih tanah mereka juga memiliki pekerjaan yang memberi kepuasan tingkat kesejahteraan. Kumpulan ini sebagian besar sistem nilainya berorientasi transisi, maknanya ialah mereka sudah berorientasi ke masa depan, namun masih tetap menjaga nilai harmonis dengan alam dan hubungan antara manusia. Kegiatannya tidak hanya untuk memenuhi nafkah hidup, namun juga tidak beresik mengejar prestasi.		
Komunitas II dengan perilaku <i>ritualism</i>	<i>Human Nature</i> (Hidup)	Hidup tidak dapat berubah (K)
	<i>Humanity and natural environment</i> (Alam)	Selaras dengan alam (T)
	<i>Time</i> (Waktu)	Orientasi masa lalu (K)
	<i>Motive of behaving</i> (Kegiatan)	Orientasi pemenuhan kebutuhan hidup (K)
	<i>Relating to other people</i> (Hubungan manusia)	Orientasi <i>collateral/horizontal</i> (K)
Komunitas ini ialah orang-orang asli yang tidak pernah mencapai tingkat kesejahteraan yang layak karena mereka ialah kumpulan yang tidak memiliki lahan, hutan, dan tetapan-palukan cara-cara untuk mencapai kesejahteraan sebagai nelayan sungai. Kumpulan ini masih berada pada sistem nilai <i>conservative</i> , karena ketidakberdayaan dan keterbatasan yang mereka hadapi. Didalam berurusan mereka masih merelakan alam yang sejak lama memberi mereka penghidupan, yakni sebagai nelayan dan tidak banyak yang mencoba mata pencaharian yang baru.		

Komunitas III dengan perilaku <i>innovative</i>	<i>Human Nature</i> (Hidup)	Hidup harus dirubah menjadi baik, membuat hidup (P)
	<i>Humanity and natural environment</i> (Alam)	Mengusasi alam (P)
	<i>Time</i> (Waktu)	Orientasi masa depan (P)
	<i>Motive of behaving</i> (Kegiatan)	Orientasi pencapaian prestasi (P)
	<i>Relating to other people</i> (Hubungan manusia)	Individualism (P)
Komunitas ini ialah kumpulan pendatang, dari luar daerah dan dari etnis yang berbeda. Kumpulan yang siap beradaptasi dengan keadaan alam dan sosial yang mereka datangi. Sibap kumpulan pendatang adalah sikap menerima tujuan budaya dari masyarakat tempat mereka tinggal, agar mereka diterima di tempat yang baru. Kumpulan ini merupakan kumpulan yang progresive, berorientasi pada kenangan di hadapan, dengan berusaha membuka mata pencaharian di tempat yang baru.		
Komunitas IV dengan perilaku <i>rebellion</i>	<i>Human Nature</i> (Hidup)	Hidup harus dirubah menjadi baik, membuat hidup (P)
	<i>Humanity and natural environment</i> (Alam)	Mengusasi alam (P)
	<i>Time</i> (Waktu)	Orientasi masa sekarang (T)
	<i>Motive of behaving</i> (Kegiatan)	Orientasi pemenuhan kebutuhan hidup (K)
	<i>Relating to other people</i> (Hubungan manusia)	Orientasi vertikal (T)
Komunitas yang merupakan bagian dari masyarakat adat, yang menciptakan sendiri standar kesejahteraan yang harus dicapai. Hal ini dapat mereka lakukan karena otoritas yang mereka miliki, yaitu sebagai aparat pemerintahan desa, dan sebagai mualik masak atau pemangku adat lainnya ( <i>formal dan informal leader</i> ). Sebagaimana sistem nilai kumpulan ini bersifat progresive, namun sebagainya lagi butiran masih berpegang kepada sistem nilai <i>conservative</i> , yakni memikirkan pemenuhan kebutuhan hidup <i>sementra</i> .		

Berkembangnya sistem orientasi nilai pada setiap komunitas, memberikan warna pada sikap serta perilaku, baik ketika mereka menghadapi permasalahan hidup bermasyarakat maupun dalam menjalankan mata pencaharian. Beberapa sistem nilai yang ber-singgungan dalam hubungan sosial antara komunitas tersebut akan saling menguatkan jika memiliki orientasi nilai yang sama, akan tetapi akan menimbulkan gesekan-gesekan dan perbenturan jika bertemu dengan sistem orientasi nilai yang bertentangan. Kumpulan *innovative* dan *rebellion* merupakan kumpulan yang *contradictive*, yakni selain sebagai pembaharu, pelopor pembukaan lahan, pemimpin pergerakan sosial “penyelamatan hutan”, mereka juga sebagai pelindung serta pendidik komunitas asli yang kurang memiliki keberanian dalam bersikap.

<sup>5</sup> Merton, 1981, *Social Theory and Social Structure*, hal 56.

### III. SIMPULAN

Perbedaan sikap yang berakibat pada perbedaan perilaku, dilatarbelakangi oleh sistem nilai tertentu. Konflik laten yang disebabkan oleh kekerasan struktur dan budaya seringkali sulit mendapatkan solusi penyelesaian, oleh karena adanya sistem nilai yang menguasai segala pertimbangan dan pemikiran pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sistem nilai ini dikuatkan oleh proses sosialisasi dan internalisasi, melalui berbagai media budaya yang dipelihara secara turun-temurun.

Kumpulan yang berperilaku *rebellion* dan *innovative* merupakan kumpulan yang membawa pengaruh dalam menciptakan situasi konflik. Orientasi nilai mereka lebih banyak bersifat progresif dan transisi, ingin mengadakan perubahan-perubahan dengan memanfaatkan hutan dan alam persekitaran sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi. Apabila kepentingan penyelamatan persekitaran hendak diutamakan, maka orientasi nilai kearah masa depan harus disosialisasikan, serta menumbuhkan sistem nilai yang diharapkan akan memelihara faktor perekat antar komunitas, memperbaiki alam dan persekitaran untuk dapat meratakan pemanfaatannya kepada seluruh warga komunitas yang bertempat-tinggal di dalamnya. Bukan dengan cara menguasai dan menguras hutan, akan

tetapi dengan memelihara keberadaan lahan hutan dan menciptakan lapangan-lapangan kerja pada berbagai bidang.

### Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas. Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim. 2003. "Otonomi dan Multibudayaisme", Makalah Seminar Nasional "Pendidikan Multibudayaisme dan Revitalisasi Hukum Adat" Diselenggarakan oleh Asisten Deputi Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Klasdan Konflik Klas dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust. Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam Liliweri, Alo.
2009. *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya*

- Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LkiS.
- Galtung, Johan. 1973. *Theories of Conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*. (Online), ([https://www.transcend.org/files/Galtung\\_Book\\_Theories\\_Of\\_Conflict\\_single.pdf](https://www.transcend.org/files/Galtung_Book_Theories_Of_Conflict_single.pdf), diakses 8 Februari 2016).
- Galtung, Johan. 1990. Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, (Online), Vol.27, No. 3, (<http://www.jstor.org/stable/423472>, diakses 8 Februari 2016).
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hills, Michael D. 2002. Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory. *Online Readings in Psychology and Culture, Unit 4*, (Online), <http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol4/i>
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern I dan II*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lawang, Robert M.Z.. 2005. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik, Suatu Pengantar*. Jakarta: FISIP-UI Press Marzali, Amri. Pergeseran Orientasi Nilai dan Keagamaan di Indonesia.
- Merton, Robert K..1981. *Social Theory and Social Structure*. New Delhi: Amerind Publishing Co.
- Poloma, Margaret. 1999. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Gramedia.
- Ritzer, George. 1988. *Sociological Theory (2<sup>nd</sup> ed)*. New York: Albert A Knopf.
- Suryawan, I Ngurah. 2010. *Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern, Bara di Bali Utara*. Jakarta: Prenada.
- Said, Kamaruddin M.. 2002. "Etnisiti atau Anomie? Analisis Sosiologikal Peristiwa Pergaduhan Beramai-ramai di Petaling Jaya Selatan", *Akademika Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, 60, hal. 21-39.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik, Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suwarsono dan Alvin Y. So. 1991. *Perubahan Sosial Dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Turner, Jonathan H. 1978. *The Structure of Sociological Theory*. Illinois: The Dorsey Press.